

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mendefinisikan usaha mikro sebagai usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan (Nihayah et al., 2022). UMKM atau yang biasa kita kenal dengan Usaha Mikro Kecil Menengah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, UMKM adalah salah satu sektor ekonomi yang paling banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Martin & Soetjipto, 2022). Sebagaimana ditunjukkan oleh statistik, Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) membentuk mayoritas sektor perekonomian Indonesia dengan lebih dari 99% (Maulana et al., 2022). Dari data KADIN Indonesia (Kamar Dagang dan Industri Indonesia, n.d.), menggambarkan perkembangan UMKM di Indonesia sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data UMKM di Indonesia

Tahun	2019	2020	2021	2022
Jumlah UMKM (juta)	65,47	64	65,46	65
Pertumbuhan (%)	1,98%	-2,24%	2,28%	-0,70%

Sumber: KADIN Indonesia (*UMKM Indonesia - KADINIndonesia*)

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM di Indonesia mengalami penurunan dan peningkatan disetiap tahun. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari artikel KADIN Indonesia, pada tahun 2019 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65,47 juta atau

tumbuh 1,98%. Dalam artikel disebutkan pada tahun 2020 terdapat 64 juta jumlah UMKM, tetapi sekitar 46,6 juta dari total tersebut belum memiliki akses permodalan dari perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, sehingga pada tahun 2020 pertumbuhan UMKM mengalami penurunan mencapai 2,24%. Selanjutnya pada tahun 2021 jumlah UMKM mengalami perkembangan mencapai 65,46 juta atau tumbuh 2,28%. Pada tahun 2022 jumlah UMKM di Indonesia mengalami penurunan mencapai 65 juta atau penurunan mencapai 0,70%.

Pada data yang peneliti dapatkan, tantangan yang akan dihadapi UMKM di masa depan harus diatasi oleh semua pihak yang terlibat, termasuk literasi digital, inovasi, produktivitas, legalitas, perizinan, pembiayaan, branding, pemasaran, sumber daya manusia, standardisasi dan sertifikasi, pembinaan, pelatihan, dan akses ke basis data tunggal. Selain itu, disebutkan pada penelitian Martin & Soetjipto (2022), bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan ketidakstabilan UMKM di Indonesia sendiri, yaitu tantangan untuk kemajuan kualitas pasar yang dipengaruhi oleh masalah internal. Ini termasuk kualitas sumber daya manusia yang rendah, sumber daya manusia yang terampil, kurangnya orientasi kewirausahaan, kurangnya penguasaan teknologi dan manajemen, kurangnya informasi, dan kurangnya orientasi pasar. Selain itu, usaha kecil dan menengah (UMKM) masih dianggap rendah dalam akuntansi keuangan. Menurut Ayulina Oktaviranti & Muhammad Iqbal Alamsyah (2023) pembukuan UMKM masih dilakukan dengan cara yang sederhana dan tidak stabil. Selain itu, berbicara tentang standar akuntansi UMKM masih cukup jauh. Karena standar yang digunakan pelaku UMKM tidak sesuai dengan penyusunan laporan keuangannya, mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Hal ini berkaitan erat dengan adanya literasi keuangan. Dimana literasi keuangan merupakan kapasitas seseorang atau kelompok untuk mengelola keuangan mereka dengan bijak sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan ekonomi mereka (Huda et al., 2023). Dalam penjelasan Nihayah (Nihayah et al., 2022), literasi keuangan berarti pengetahuan dan

kemampuan tentang keuangan serta bagaimana menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Literasi keuangan juga dapat dikaitkan dengan kebiasaan, perilaku, dan pengaruh faktor luar. Keputusan keuangan yang dibuat oleh pemilik UMK tentang keuangan pribadi dan bisnis mereka sangat penting. Berdasarkan informasi yang telah dijelaskan oleh peneliti, kurangnya pengetahuan dan kemampuan pelaku UMKM tentang pentingnya literasi keuangan akan berdampak pada kemampuan mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang, seperti manajemen kas harian. Selain itu, masalah pengelolaan keuangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di seluruh dunia yaitu berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mengelola keuangan bisnis mereka sendiri (Nihayah et al., 2022). Dari data Otoritas Jasa Keuangan (2022) menggambarkan perbandingan indeks literasi keuangan sebagai berikut:

**Tabel 1. 2 Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi
Keuangan Tahun 2019 dan 2022**

Indeks	2019	2022
Literasi	38,03%	49,68%
Inklusi	76,19%	85,10%
Gap	38,16%	35,42%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Berdasarkan tabel 1.2 yang dimana menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sesuai dengan hasil dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) pada tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 49,68% dibanding dengan tahun 2019 mencapai 38,03%. Sementara indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10% dan mengalami kenaikan dibanding dengan 2019 yang mencapai 76,19%. Hal ini menunjukkan penurunan yang terus menerus dalam perbedaan antara tingkat literasi dan inklusi, yang turun dari 38,16% pada tahun 2019 menjadi 35,42% pada tahun 2022.

**Tabel 1. 3 Perbandingan Indeks Literasi dan
Inklusi Keuangan Syariah**

Indeks Syariah	2019	2022
Literasi	8,93%	9,14%
Inklusi	9,10%	12,12%

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022) yang menjelaskan bahwa pada tahun 2019 literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 8,93% yang dimana ini sangat berbanding jauh terbalik dengan literasi keuangan secara umum, dimana menjelaskan pada tabel 1.2 mencapai 38,03%. Kemudian pada tahun 2022 belum mencapai peningkatan secara signifikan dari tingkat literasi keuangan syariah, dimana hanya meningkat mencapai 0,21% dibandingkan dengan literasi keuangan secara umum yang meningkat jauh drastis menjadi 49,68% atau mengalami peningkatan mencapai 11,65%. Berdasarkan dari data yang sudah disebutkan dan dijelaskan, muncul adanya gap antara literasi keuangan secara umum dengan literasi keuangan syariah. Hal ini memerlukan adanya pendalaman lebih jauh mengenai literasi keuangan syariah di masyarakat. Dan jika kita melihat dari tabel 1.2 terdapat gap antara literasi dengan inklusi keuangan, sehingga hal ini perlu ditelusuri lebih jauh lagi.

Dari pemaparan data diatas, maka penulis menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk memahami konsep dan prinsip keuangan syariah, termasuk produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Literasi keuangan syariah mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip seperti riba, gharar, dan maysir, serta produk keuangan syariah seperti tabungan, investasi, dan asuransi. Dengan memiliki literasi keuangan syariah, seseorang dapat membuat keputusan keuangan yang bijaksana sambil mempertimbangkan manfaatnya sendiri dan bahayanya (Menne, 2023)

Disamping itu, literasi keuangan juga mampu untuk memengaruhi bagaimana kinerja dari ketahanan keuangan UMKM itu sendiri. Pendapatan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi ketahanan keuangan seseorang; seseorang harus memiliki kemampuan untuk mengelola aset likuid dan menyediakan dana darurat jika mereka ingin memperoleh ketahanan keuangan yang kuat. Penganggaran sederhana adalah cara terbaik untuk menerapkan konsep ketahanan keuangan bagi pelaku UMKM; tujuannya adalah untuk membedakan kebutuhan terkait usaha atau kebutuhan pribadi (Nihayah Nihayah et al., 2022).

Kemudian di Yogyakarta sendiri jumlah pelaku UMKM yang terdata sesuai dengan data Dinas Koperasi dan UKM pada tahun 2020-2023 menjelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Data UMKM DIY 2020-2023

Sub Elemen	2020	2021	2022	2023	Satuan
Usaha Mikro	188.033,00	318.892,00	324.745,00	324.408,00	Unit
Usaha Kecil	58.980,00	16.061,00	16.069,00	16.069,00	Unit
Usaha Menengah	30.664,00	2.107,00	2.110,00	2.109,00	Unit

Sumber: (Dinas Koperasi & UKM, 2024)

Tabel 4.1 ini menjelaskan bagaimana jumlah dari UMKM yang semakin meningkat di tiap tahunnya yang memberikan gambaran bahwa adanya peningkatan dalam perbaikan taraf hidup masyarakat serta semakin terbukanya pola pikir masyarakat dan juga peran dari pemerintah semakin baik dalam mendukung pertumbuhan dari UMKM. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Penyebab utama pertumbuhan ini antara lain adalah adanya dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mendukung

UMKM, seperti pembiayaan yang mudah diakses, pelatihan untuk peningkatan keterampilan, serta berbagai insentif pajak yang mendorong pelaku UMKM untuk berkembang. Selain itu, faktor geografis Yogyakarta yang strategis juga turut berperan dalam memudahkan akses pasar dan distribusi produk UMKM ke berbagai wilayah di Indonesia.

Namun pertumbuhan ini ternyata tidak sebandung dengan data yang dijelaskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2022) dimana OJK melakukan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia di wilayah Yogyakarta pada indeks literasi mencapai 54,58% lebih rendah dari tahun 2019 dengan perbedaaan 4%. Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks literasi secara nasional Yogyakarta memiliki indeks literasi yang lebih baik dimana secara Nasional sendiri indeks literasinya hanya sebesar 49,68%. Kemudian untuk inklusi keuangan sendiri pada wilayah Yogyakarta mencapai 82,08% lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2019 dengan angka kenaikan 8%. Sedangkan jika dibandingkan dengan indeks inklusi secara nasional, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki indeks inkulis yang lebih rendah sedikit dari Nasional sebesar 85,10%.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan, bahwa banyak masyarakat DIY yang mengakses produk jasa keuangan tetapi pemahamannya masih kurang. Untuk peningkatan literasi keuangan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) DIY mempunyai sasaran utama yakni perempuan, UMKM, masyarakat di daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) serta masyarakat difabel. Hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang barang dan jasa industri keuangan sehingga mereka dapat menghindari investasi bodong, pinjaman ilegal online, bank plecit, rentenir, dan lainnya.

Penjelasan diatas, sejalan dengan objek yang peneliti lakukan pada Binaan Lazismu UMY, pada ajang yang diadakan oleh Bank Indonesia di Surabaya pada tanggal 29-1 Oktober 2023 meraih penghargaan juara 1 di acara Festival Ekonomi Syariah (Fesyar 2023). Pencapaian tersebut menunjukkan kinerja Lazismu UMY sangat baik, penghargaan yang

diberikan oleh Bank Indonesia merupakan program ekonomi yang menitikberatkan pada program unggulan bidang ekonomi pemberdayaan, dan pengelolaan lazis dalam memberdayakan masyarakat yang dikaitkan dengan SDG's berkelanjutan. Lazismu UMY juga memiliki program yang dapat menunjang UMKM, program pilar ekonomi tersebut yaitu USAHAMU yang memberikan pendampingan pelatihan kepada para pelaku UMKM. Melalui program USAHAMU, Lazismu UMY mengelola dana zakat yang diterima kemudian disalurkan kepada UMKM yang telah lolos seleksi dan mengikuti pelatihan yang diberikan oleh Lazismu UMY. Hal inilah yang kemudian menjadi bahan penilaian pada ajang Fesyar 2023 mengenai pemberdayaan ekonomi. Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti mengambil judul **“Analisis Literasi Keuangan Syariah Dan Manajemen Keuangan Pelaku UMKM Terhadap Perkembangan Bisnis di Binaan Lazismu UMY”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah saya paparkan diatas, rumusan masalah yang saya ambil adalah:

1. Bagaimana tingkat literasi keuangan syariah di kalangan pelaku UMKM?
2. Bagaimana dampak literasi keuangan syariah dan manajemen keuangan pelaku UMKM dalam perkembangan bisnis di Binaan LAZISMU UMY?
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan manajemen keuangan pelaku UMKM guna mendukung perkembangan bisnis di Binaan LAZISMU UMY?

C. Tujuan

Secara umum, penelitian bertujuan untuk mengetahui literasi keuangan syariah pada UMKM Binaan LAZISMU UMY. Adapun penelitian ini dilakukan bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan syariah di kalangan

pelaku UMKM.

2. Untuk mengetahui dampak literasi keuangan syariah dan manajemen keuangan pelaku UMKM dalam perkembangan bisnis di Binaan LAZISMU UMY.
3. Untuk mengetahui upaya dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan manajemen keuangan pelaku UMKM guna mendukung perkembangan bisnis di Binaan LAZISMU UMY.

D. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan literasi keuangan syariah dan manajemen keuangan terhadap perkembangan bisnis.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan bagi pelaku UMKM lainnya untuk menerapkan literasi keuangan syariah terutama terhadap perkembangan bisnisnya tersebut.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Harapannya hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat umum terutama pelaku UMKM tentang pentingnya akan literasi keuangan syariah terhadap perkembangan bisnis.
 - b. Harapannya hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa.